

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang sangat kompleks dan sering menjadi masalah internasional dan nasional yang menimbulkan keprihatinan banyak orang. Untuk kemiskinan dapat segera teratasi, masalah ini harus mendapat penanganan yang tepat. Kemiskinan adalah masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan, yang merupakan salah satu masalah utama perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang, tampak seperti "pekerjaan rumah" yang tidak dapat diselesaikan. Sebenarnya, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mengatasi kemiskinan, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai kepada orang miskin hingga program transmigrasi.

Kemiskinan dipandang dalam Islam sebagai masalah yang berbahaya bagi jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Orang yang hidup miskin tidak dapat melakukan kewajiban agama sepenuhnya, tidak memiliki akses ke pendidikan yang baik, dan layanan kesehatan dan kehidupan yang layak. Akibatnya, umat Islam melarang meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, baik dalam hal agama, ilmu, maupun ekonomi, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar” (Q.S. An-Nisa’: 9).*

Ibnu Katsir menjelaskan pesan Rasulullah kepada Sa'ad Abi Waqash untuk meninggalkan ahli warisnya, menunjukkan bahwa keturunan yang lemah identik dengan kondisi kekurangan harta dalam kondisi yang memadai (Katsir, 1999). Jika ditelaah lebih lanjut, ayat ini mengandung pesan filosofis yang sangat penting bahwa kemiskinan adalah masalah yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam konteks modern.

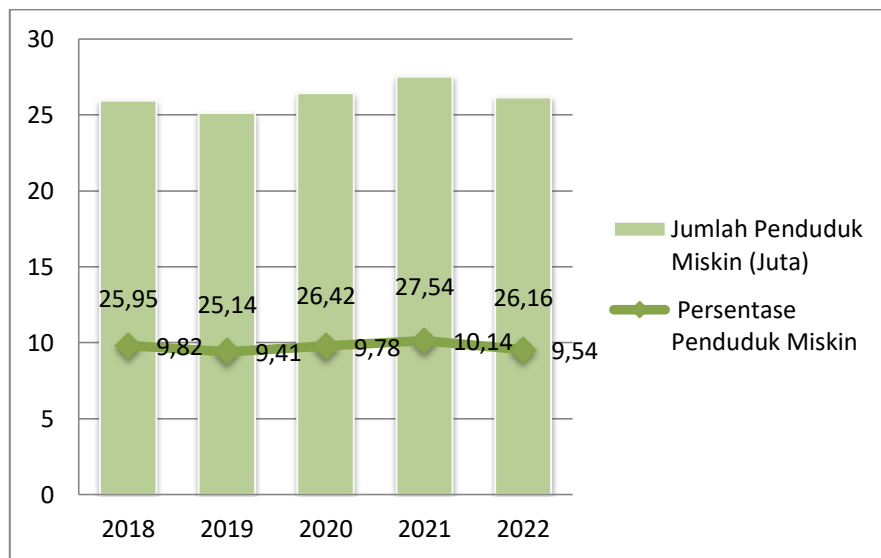
Indonesia salah satu negara berkembang, harus menangani kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan populasi, yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan yang masih sulit diakses. Menurut Supriatna (1997), kemiskinan adalah kondisi yang memiliki banyak keterbatasan yang terjadi tanpa kehendak individu yang bersangkutan. Tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidup, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan, menjadikan seseorang miskin. Terbatasnya sumber daya manusia di sekolah formal dan nonformal dapat menyebabkan kemiskinan, yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya pendidikan informal.

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia. Untuk alasan ini, kemiskinan harus menjadi prioritas utama pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk mengakhiri kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program. Ada dua pendekatan yang harus digunakan dalam upaya mengakhiri kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka dapat mencegah kemiskinan baru muncul. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, pengentasan kemiskinan dilakukan (Royat, 2015).

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Untuk memahami kemiskinan di Indonesia, penting untuk memperhatikan tingkat kemiskinan lokal, yang ditentukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karena itu, kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah, dan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang lebih objektif dan efektif. Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,54%, meningkat 0,03% dibandingkan Maret 2022 dan turun 0,14% dibandingkan September 2021.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebanyak 26,36 juta jiwa, meningkat 0,20 juta jiwa dibandingkan Maret 2022 dan turun 0,14 juta jiwa dibandingkan September 2021. Angka kemiskinan di perkotaan pada September 2022 sebesar 7,53%, meningkat menjadi 7,53% pada September 2022.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Indonesia

Grafik 1. 1

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, 2018-2022

Salah satu provinsi Indonesia dengan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Jawa Tengah, angka kemiskinannya pada September 2021 sebesar 11,25%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,71%. Jawa Tengah memiliki 13,2% penduduk miskin pada tahun 2016, menduduki peringkat ke-12 di Indonesia untuk jumlah penduduk miskin. Berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja,

memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Meskipun kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi, pemerintah, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, telah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Ini mencakup peningkatan bantuan sosial, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Singkatnya, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang paling miskin di Indonesia. Pemerintah dan berbagai pihak lain telah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Tabel 1. 1

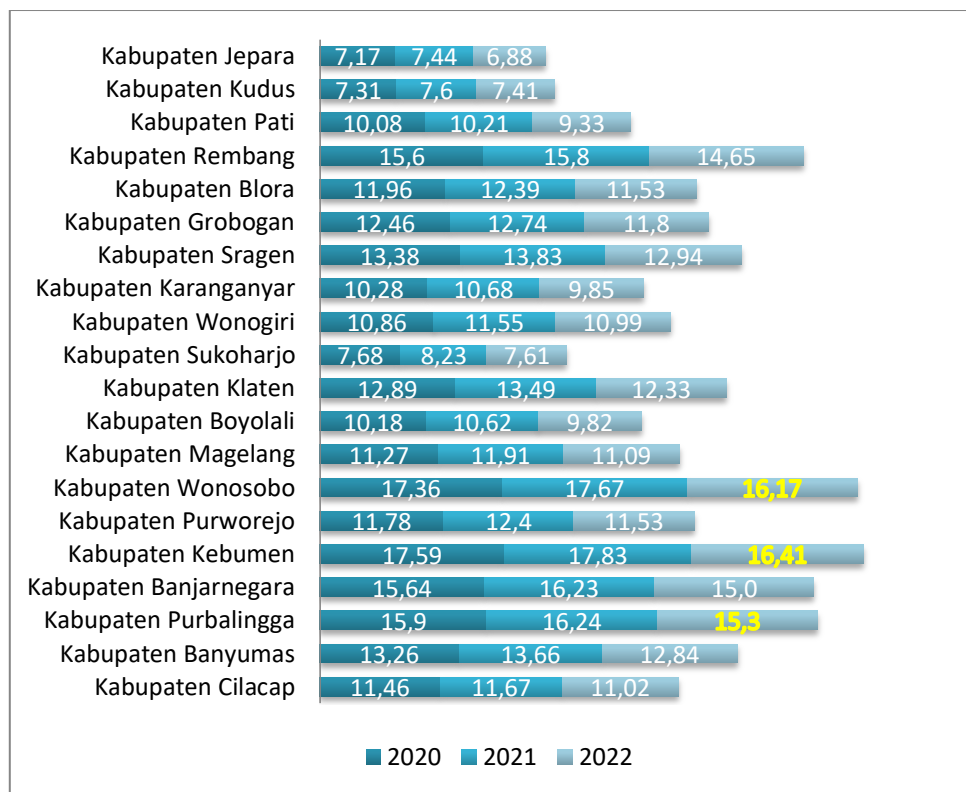
Kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2022

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai</b>
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	438833
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	3831440
Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,93

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 10,93%, atau sekitar 3,8 juta orang, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 11,79%, atau sekitar 4,1 juta orang. Meskipun demikian, kemiskinan masih tinggi di beberapa daerah Jawa Tengah. Garis kemiskinan per kapita di

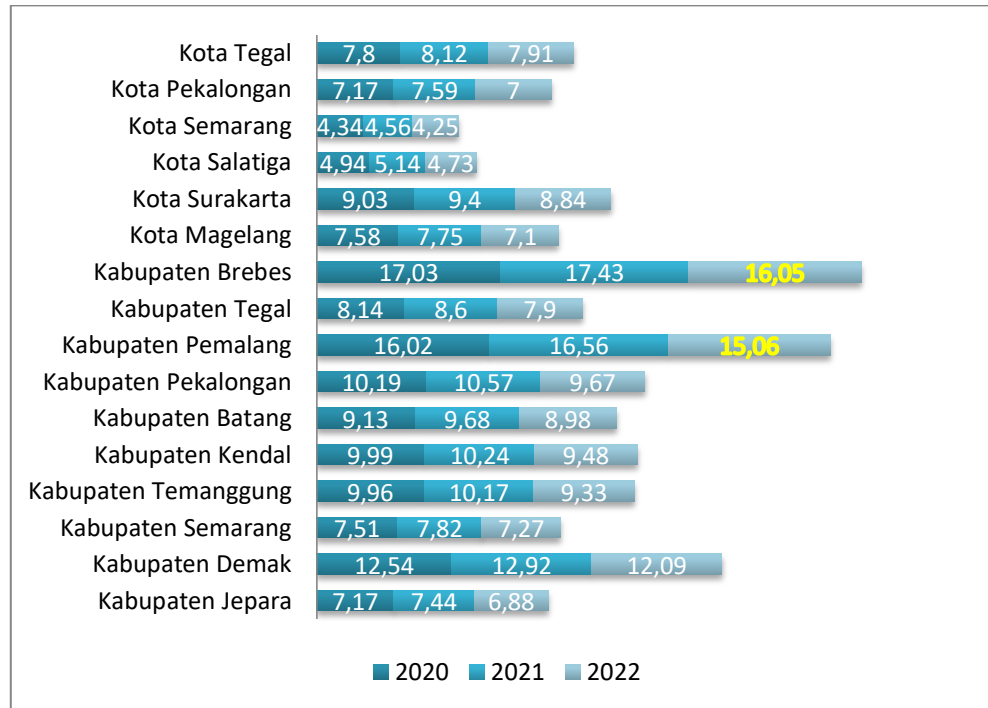
Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah Rp 438.833 per bulan. Dari data kemiskinan di provinsi Jawa Tengah masih banyak daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya melebihi rata-rata. Berikut grafik persentase kemiskinan Kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun pada 3 tahun terakhir dari tahun 2020 - 2022.



Sumber data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 2

Persentase kemiskinan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2022



Sumber data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 3

Persentase kemiskinan Kabupaten dan Kota tahun 2020-2022 (lanjutan)

Dari grafik 1.2 dan 1.3 terlihat perbandingan antara setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dari grafik menunjukkan bahwa terdapat 5 persentase kemiskinan tertinggi yaitu: Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sebesar 17,36%, tahun 2021 sebesar 17,67%, tahun 2022 sebesar 16,17%, Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 17,59%, tahun 2021 sebesar 17,83%, tahun 2022 sebesar 16,41%, Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 15,9%, tahun 2021 sebesar 16,24%, tahun 2022 sebesar 15,3%, Kabupaten Brebes pada

tahun 2020 sebesar 17,03%, tahun 2021 sebesar 17,43%, tahun 2022 sebesar 16,05%, dan Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar 16,02%, tahun 2021 sebesar 16,56%, tahun 2022 sebesar 15,06%. Dari 5 Kabupaten ini memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan dari 3 terakhir ini kelima Kabupaten mengalami kemiskinan ekstrem. Dengan demikian penelitian memfokuskan pada 5 Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Kebumen, Pemalang, Wonosobo, Brebes, dan Purbalingga.

Kemiskinan ekstrem dialami oleh Kabupaten Kebumen, Pemalang, Wonosobo, Brebes, dan Purbalingga kenaikan kemiskinan yang signifikan dengan dilihat dari garis kemiskinan dan jumlah kemiskinan berikut.

Tabel 1. 2

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) di 5 Kabupaten termiskin di Jawa tengah dari tahun 2018-2022

Tahun	Kebumen	Pemalang	Wonosobo	Brebes	Purbalingga
2018	342437	351183	323490	405932	324735
2019	362847	372115	340827	414642	355702
2020	380557	389209	362683	431897	375199
2021	390599	401857	373474	445853	384183
2022	416004	429549	399180	472326	407849

Sumber Data : BPS Jawa Tengah

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat perkembangan Garis Kemiskinan (GK) di semua 5 kabupaten di Jawa Tengah dan terlihat bahwa itu terus mengalami perubahan. Kabupaten Brebes memiliki tingkat perkembangan garis kemiskinan



yang paling tinggi pada tahun 2022, dengan angka garis kemiskinan sebesar 472326.00 yang paling besar diantara 4 kabupaten termiskin lainnya.

Tabel 1. 3

Jumlah kemiskinan di 5 Kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2018-2022

Tahun	Kebumen	Pemalang	Wonosobo	Brebes	Purbalingga
2018	208700	208300	138300	309200	144200
2019	201300	200700	131300	293200	140100
2020	211090	209030	137630	308780	149480
2021	212920	215080	139670	314950	153080
2022	196160	195840	128110	290660	145330

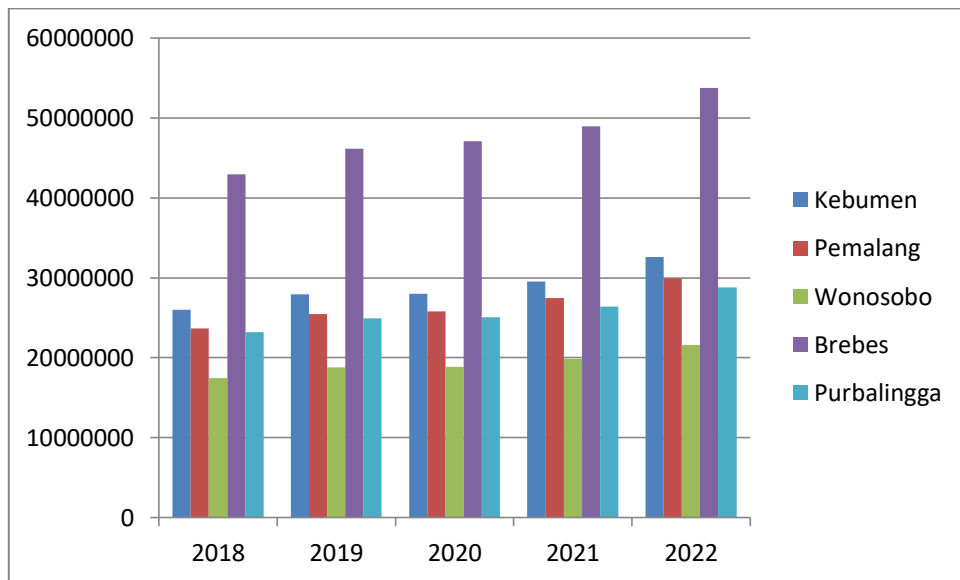
Sumber Data: BPS Jawa Tengah

Dari tabel 1.3 Menunjukkan bahwa fluktuasi kenaikan dan penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Pada tahun 2022 pada setiap 5 kabupaten mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi tidak memungkiri bahwa pada tahun tersebut 5 kabupaten ini masuk dalam kemiskinan ekstrem dan peringkat teratas tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Dapat dilihat jumlah kemiskinan terbanyak yaitu dari kabupaten Brebes dengan jumlah 290660 warga. Meskipun dari tingkat persentase kemiskinan dibawah kabupaten Kebumen dan Wonosobo tetapi dengan jumlah penduduk yang banyak hal ini harus dicemaskan.

Jumlah kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk memberikan lebih banyak perhatian pada pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan kemiskinan terlebih dahulu, perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Ini diperlukan untuk membuat kebijakan yang efektif

untuk menangani masalah ini. Faktor-faktor berikut diduga mempengaruhi kemiskinan di 5 Kabupaten di Jawa Tengah: (1) PDRB, (2) Pengangguran, (3) UMR, (4) IPM dan (5)APS.

Salah satu ukuran utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Harga pasar berlaku terbesar keempat di Indonesia, PDRB Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp 1,42 kuadriliun, tumbuh sebesar 3,23% dari harga konstan tahun 2010, lebih tinggi dari kontraksi tahun 2020 sebesar 2,65%. Berikut PDRB dari 5 Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Jawa Tengah.



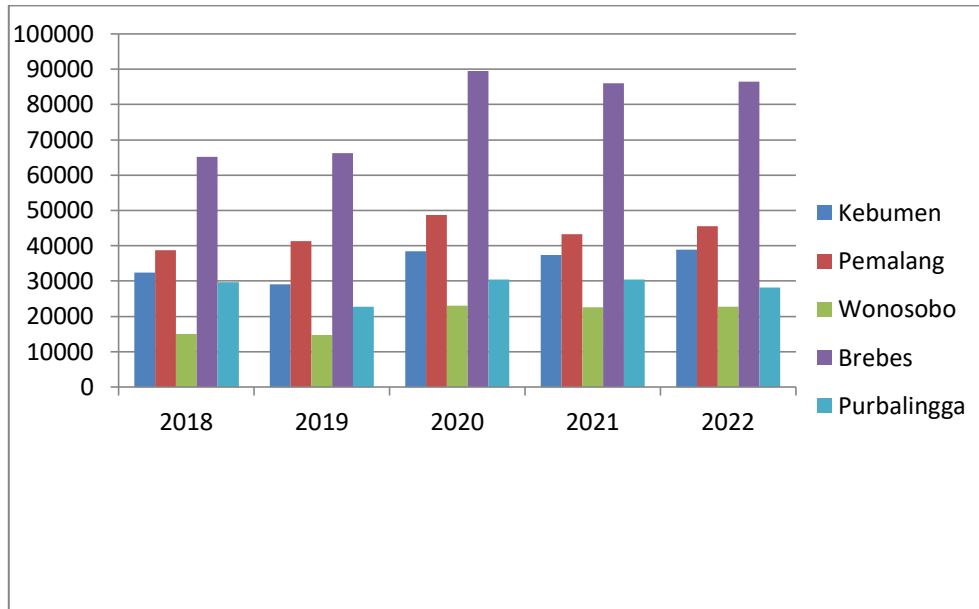
Sumber data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah (juta rupiah) pada 5 Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018-2022

Dari grafik 1.4 menunjukkan dari 5 tahun terakhir kelima kabupaten mengalami kenaikan pada produk domestik regional bruto yaitu Kabupaten Kebumen dari tahun 2018 sebesar 26,037 milyar dan pada tahun 2022 sebesar 32,601 milyar, Kabupaten Pemasang dari tahun 2018 sebesar 23,670 milyar dan pada tahun 2022 sebesar 29,948 milyar, Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 sebesar 17,493 milyar dan pada tahun 2022 sebesar 21,590 milyar, Kabupaten Brebes dari tahun 2018 sebesar 42,973 milyar dan pada tahun 2022 sebesar 53,771 milyar, dan pada Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 sebesar 23,190 milyar dan pada tahun 2022 sebesar 28,820 milyar. Dengan PDRB yang besar dirasa dapat mengurangi kemiskinan.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih besar diperlukan. Untuk mencapai hal ini, diharapkan misi pembangunan didistribusikan ke masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Salah satu karakteristik kemiskinan di Jawa Tengah adalah rendahnya pendidikan, yang menyebabkan sedikit lapangan kerja tersedia dan banyak pengangguran. Pengangguran juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti tidak tersedianya lapangan kerja atau bahkan keinginan seseorang untuk bekerja karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan minatnya atau karena ketidakcocokan yang mereka alami selama proses pekerjaan.



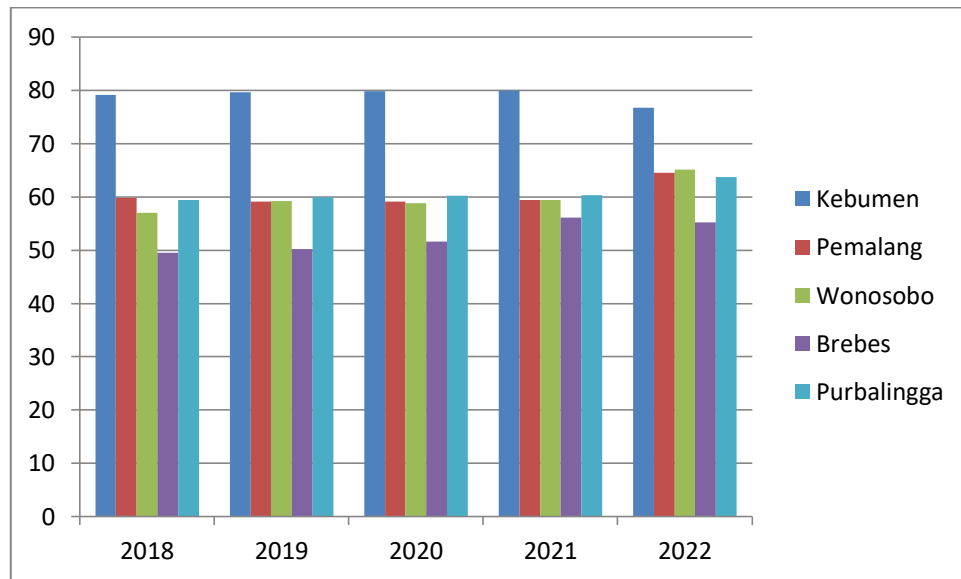
Sumber Data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 5

Jumlah Pengangguran (UNMP) di Jawa Tengah Pada 5 Kabupaten tahun 2018-2022

Gambar 1.5 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 hingga 2022, yang menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah pengangguran tahun 2022 di Kebumen sebesar 38969, di kabupaten Pemalang sebesar 45587, di Wonosobo sebesar 22714, kemudian di Brebes sebesar 86501, dan Purbalingga sebesar 28188. Angka ini ada yang mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2022 pada masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan jumlah pengangguran yaitu kabupaten Kebumen, Pemalang, Wonosobo, dan Brebes.

Mungkin pula pengangguran yang meningkat juga didukung karena adanya tingkat menempuh pendidikan tinggi yang rendah. Sehingga untuk mendapatkan dan bersaing dalam pekerjaan sulit bagi masa ini dengan kualitas sumber daya manusianya yang rendah.



Sumber Data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 6

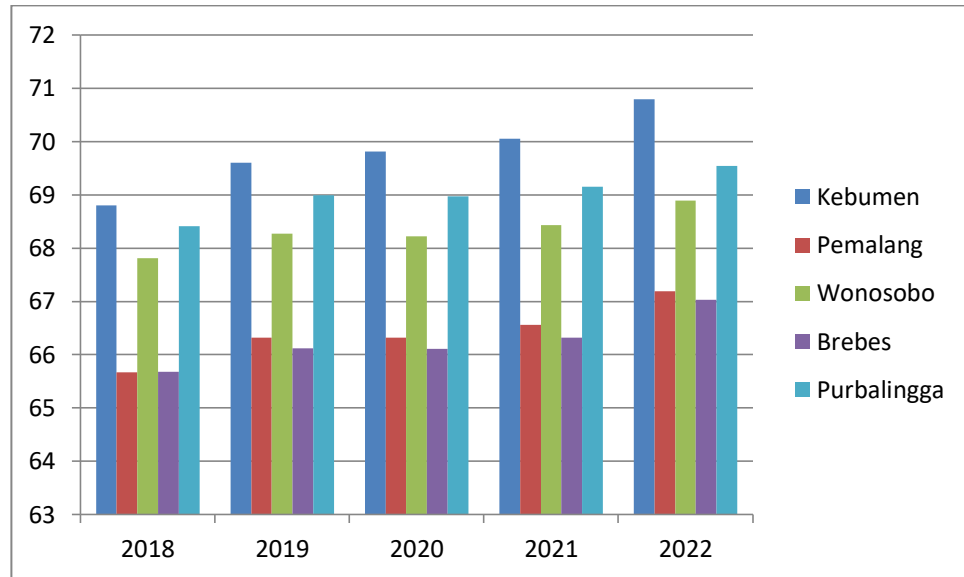
Angka Partisipasi Sekolah (APS) persen, usia 16-18 tahun 5 Kabupaten, 2018-2022

Dapat dilihat dari gambar 1.6 Adanya kenaikan dan penurunan angka partisipasi sekolah rentan usia 16-18 tahun pada setiap daerah. Hal ini harus dikhawatirkan karena masih adanya penurunan dalam orang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dilihat yang mengalami penurunan minat belajar pada tahun 2022 yaitu kabupaten Kebumen dan Brebes. Dilihat adanya fluktuasi dari setiap daerahnya yang cenderung naik dan beberapa daerah ada yang

mengalami penurunan. Penurunan terlihat jelas pada kabupaten Kebumen dari tahun 2021 menurun sebesar 3,14% pada tahun 2022 dengan angka partisipasi sekolah SLTA sebesar 76,77 dan Brebes dari tahun 2021 menurun sebesar 0,88% pada tahun 2022 dengan angka partisipasi sekolah SLTA sebesar 55,25. Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun atau jenjang SLTA tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata angka partisipasi sekolah dasar yaitu 90% dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yaitu 96%. Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya minat belajar atau tidak melanjutkan pendidikan semakin tinggi.

Dimana pendidikan penting untuk melangkah dalam jenjang kerja yang layak, yang dimana pendidikan yang tinggi diharap mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini juga berhubungan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada setiap daerahnya. Hal ini juga berhubungan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada setiap daerahnya.

Tingkat peningkatan faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Faktor-faktor ini terdiri dari tingkat kesehatan masyarakat, pengeluaran per kapita, atau daya beli masyarakat, dan rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh orang yang berusia 15 tahun ke atas. Faktor-faktor ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat per orang.



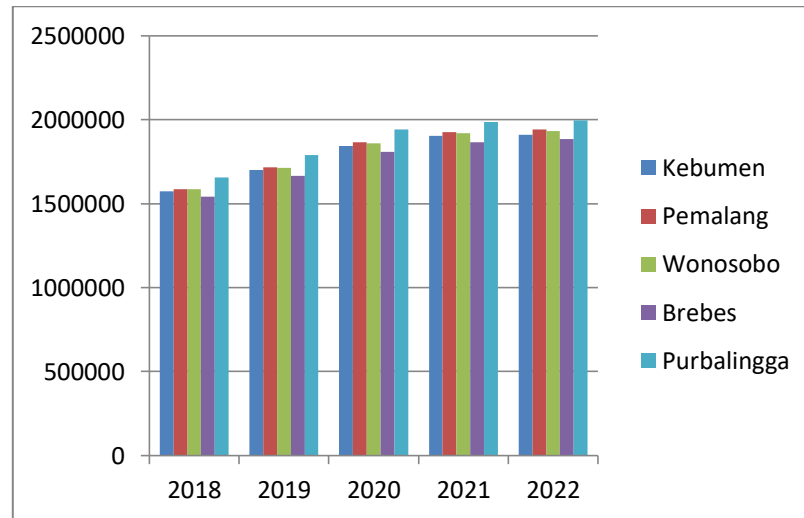
Sumber Data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 7

#### Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 5 kabupaten, 2018-2022

Dari grafik 1.7 dapat dilihat semua Kabupaten mengalami peningkatan IPM pada tahun 2022 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. IPM Kebumen ditahun 2018 sebesar 68,8 dan pada tahun 2022 sebesar 70,79, Pemasang ditahun 2018 sebesar 65,67 dan pada tahun 2022 sebesar 67,19, Wonosobo ditahun 2018 sebesar 67,81 dan pada tahun 2022 sebesar 68,89, Brebes ditahun 2018 sebesar 65,68 dan pada tahun 2022 sebesar 67,03, dan Purbalingga ditahun 2018 sebesar 68,41 dan pada tahun 2022 sebesar 69,54. Meskipun mengalami kenaikan, tetapi masih belum cukup memenuhi standar rata-rata IPM Indonesia yang sebesar 72,91. Dilain halnya ada UMR yang

menjadi faktornya dan Jawa tengah masih memiliki Upah Minimum Regional yang rendah.



Sumber data : BPS Jawa Tengah

Grafik 1. 8

Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Tengah pada 5 kabupaten tahun 2018-2022 (rupiah)

Dari grafik 1.8 menunjukkan UMR dari setiap kabupaten dari tahun 2018 sampai 2022. Terlihat UMR pada tahun 2022 sudah melebihi rata-rata UMP Jawa Tengah yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp1.812.935. Upah pada 5 Kabupaten ini mengalami peningkatan yaitu pada Kabupaten Kebumen sebesar Rp1.911.850, Pemalang sebesar Rp1.940.890, Wonosobo sebesar Rp1.931.285, Brebes sebesar Rp1.885.019, dan Purbalingga sebesar Rp1.996.814. Pemerintah Jawa Tengah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp1.958.169, naik 8,01% dari UMP tahun



sebelumnya sebesar Rp1.812.935. UMP Jawa Tengah juga menjadi yang terendah di seluruh negeri pada tahun itu. Dengan adanya peningkatan upah minimum dirasa menjadikan pendapatan meningkat dengan itu kebutuhan terpenuhi dengan cukup dan menjadikan daya beli meningkat. Sehingga hal ini berpengaruh mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Produk domestik regional bruto (PDRB), Pengangguran (UNMP), indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum regional (UMR) yang berdasarkan dari penelitian terdahulu yaitu “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011” (Niswati, 2014), “Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012” (Ramdani, 2015), “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean) (Syarifullah dan Malik, 2017), Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah (Hikma, Ramadhani, & Amalia, 2019)

Maka, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada 5 kabupaten di Jawa Tengah : pendekatan data panel periode 2011-2022”.

## **B. Batasan Masalah**

Peneliti membatasi variabel berikut untuk digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel dependen (Y) adalah Kemiskinan 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel independen adalah (X1) Upah minimum regional, (X2) Indeks pembangunan manusia, (X3) PDRB, (X4) Pengangguran, dan (X5) Angka partisipasi Sekolah.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dengan mempertimbangkan konteks sebelumnya, masalah yang akan diteliti termasuk:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 – 2022
2. ?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 - 2022?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 - 2022?
5. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 - 2022?

6. Bagaimana pengaruh Angka partisipasi sekolah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 - 2022

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, menurut rumusan masalah sebelumnya, adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 – 2022.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 – 2022.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 – 2022.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 – 2022.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2011 – 2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu

1. Untuk memberi pembaca informasi tambahan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dapat digunakan sebagai referensi.
3. Untuk pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat membuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.